**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

1. **Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka yang diuraikan dalam penelitian ini pada dasarnya dijadikan acuan untuk mendukung dan memperjelas penelitian ini. Sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, teori yang dianggap relevan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. **Konsep Buta Aksara**

Buta aksara adalah masalah yang sangat serius karena jika seseorang buta aksara alias tidak berkemampuan untuk membaca dan menulis akan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. UUD 1945 mengamanatkan kepada semua warga Negara untuk memberantas buta aksara sesuai dengan tujuan Negara yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

1. **Pengertian buta aksara**

Buta aksara merupakan halangan untuk melihat dunia. Artinya, jika orang tidak bisa membaca, dia tidak dapat melihat dunia baru dan segala perkembangannya, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta teknologi informasi.

Sihombing (Sujarwo, 2008: 30) menjelaskan secara konseptual:

Buta aksara dipahami sebagai buta dalam arti buta bahasa Indonesia, buta pengetahuan dasar yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari, buta aksara dan angka, buta akan informasi kemajuan teknologi, merupakan beban berat untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam arti mampu menggali dan memanfaatkan peluang yang ada di lingkungannya.

Pengertian buta huruf menurut Sihombing di atas adalah merupakan kelompok masyarakat yang tidak mungkin mendapatkan pelayanan pendidikan sekolah karena sebagian besar mereka telah berusia lanjut, sedangkan usia sekolah pada umumnya sudah masuk jalur persekolahan, mereka pada umumnya berasal dari keluarga miskin yang tidak mampu memikul biaya pendidikan yang diperlukan.

Selanjutnya Wilastinova (2011: 57) menjelaskan:

Buta aksara adalah ketidakmampuan membaca dan menulis baik bahasa Indonesia maupun bahasa lainnya. Buta aksara juga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk menggunakan bahasa dan menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan, mengungkapkannya dalam bentuk tulisan, dan berbicara.

Dalam dua pengertian di atas dapat diketahui bahwa buta aksara diartikan sebagai ketidakmampuan untuk membaca dan menulis pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain, atau dalam taraf bahwa seseorang dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca-tulis, sehingga dapat menjadi bagian dari masyarakat tersebut, yang dimana ketidakmampuan itu membuat mereka tidak dapat memanfaatkan peluang yang ada di lingkungannya.

UNESCO (2011: 29) mendefinisikan bahwa buta aksara adalah:

Kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi dan menghitung, menggunakan material tercetak dan tertulis terkait dengan konteks yang bervariasi. Literasi melibatkan kontinum belajar dalam memungkinkan individu untuk mencapai tujuan mereka, untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi mereka, dan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam komunitas mereka dan masyarakat yang lebih luas.

Terkait dengan pengertian di atas buta aksara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 189):

Buta aksara terdiri dari dua kata yakni buta dan aksara, buta diartikan sebagai tidak dapat melihat, mengenali sesuatu dalam bentuk dan warna dengan cara melihat sedangkan aksara adalah sistem tanda grafis atau sistem tulisan yang digunakan manusia untuk berkomunikasi.

Dari pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas sistem tulisan yang dimaksud adalah manusia yang dapat menyimpan kekayaan akal budinya serta mengingat berbagai peristiwa. Karena daya ingat manusia terbatas, dapat dikatakan bahwa tulisan memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam pencatatan sejarah dan berbagai macam peristiwa dalam kehidupan manusia. Tanda-tanda grafis yang digunakan untuk pencatatan tersebut adalah huruf.

Banyak analis kebijakan menganggap angka buta aksara merupakan tolok ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang berdalih bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih murah dari pada melatih orang yang buta aksara, dan umumnya orang-orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. Argumentasi para analis kebijakan ini juga menganggap kemampuan baca tulis juga berarti peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi.

Kemampuan baca tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.

1. **Penyebab buta aksara**

Buta aksara yang ada di Indonesia sebenarnya telah ada sejak zaman penjajahan. Dari pihak negara penjajah memang telah disengaja agar rakyat Indonesia menjadi lebih terbelakang dan bodoh-bodoh agar nantinya tidak merugikan mereka yang menjajah. Pada masa tersebut, tidak ada sekolah untuk rakyat yang bukan keturunan “ningrat”, sehingga rakyat Indonesia yang miskin sama sekali tidak ada kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan terjadilah buta aksara. Hal ini sama sekali tidak menguntungkan rakyat Indonesia sendiri, karena menjadikan penjajah makin lama menduduki Indonesia.

Dirjen PLSP Depdiknas Fasli Jalal (2004) mengatakan, buta aksara disinyalir menjadi salah satu penghambat suksesnya wajib belajar 9 tahun. Berdasarkan penelitian, kalau orangtua buta aksara, maka ada kecenderungan anaknya tak sekolah, jikapun sekolah, berpotensi untuk putus sekolah sehingga buta huruf bukan sekadar tidak mampu membaca dan menulis, melainkan berpotensi menimbulkan serangkaian dampak yang sangat luas.

Wilastinova (2011: 87) menjelaskan yaitu secara umum faktor penyebab buta aksara di Indonesia adalah dikarenakan "(1) Tidak sekolah/ putus sekolah, (2) Kemiskinan, (3) Jauh dengan layanan pendidikan dan (4) Orang tua yang menganggap sekolah itu tidak penting". Selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyebab buta aksara yang terjadi di Indonesia adalah karena mereka tidak pernah bersekolah sama sekali atau putus sekolah yang disebabkan oleh banyak faktor yang diantaranya adalah faktor budaya, sosial, politik, ekonomi, dan gender.
2. Kemiskinan, kemiskinan adalah faktor utama yang membuat seseorang menjadi buta aksara karena untuk makan sehari-hari juga masih sulit apalagi untuk mengenyam bangku sekolah, meskipun sekarang sudah yang namanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tapi dana tersebut banyak di korupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Jauh dengan layanan pendidikan, layanan pendidikan yang jauh juga menjadi faktor seseorang menjadi buta aksara, contohnya saja di daerah pedalaman atau daerah terpencil sangat jauh ke sekolah dasar sekalipun, apalagi ke sekolah lanjutan. Mereka yang di daerah terpencil harus berangkat pagi-pagi sekali atau jam lima pagi karena jarak rumahnya dengan sekolah sangat jauh.
4. Orang tua menganggap bahwa sekolah itu tidak penting. Orang tua menganggap bahwa sekolah adalah perbuatan yang sia-sia, tidak penting dan lebiih baik menyuruh anak mereka untuk membantu berladang, berternak, berjualan,menggembala hewan, atau bahkan mereka mereka menyuruh anak mereka untuk mengemis atau ngamen di jalan.

Dari beberapa faktor di atas, kemiskinan adalah faktor utama yang membuat seseorang menjadi buta aksara karena untuk makan sehari-hari juga masih sulit apalagi untuk mengenyam bangku sekolah. Faktor struktural juga merupakan faktor cukup memiliki andil dalam menciptakan masyarakat buta huruf karena layanan pendidikan yang jauh juga menjadi faktor seseorang menjadi buta aksara.

Selanjutnya UNESCO (2011) menjelaskan penyebab utama buta aksara di Indonesia adalah dikarenakan kondisi sosial masyarakatnya sendiri yang meliputi:

1)      Kesehatan dan gizi masyarakat, kondisi kesehatan dan gizi masyarakat yang kurang baik, jika tidak diperhatikan dengan seksama akan berpengaruh pada menurunya angka partisipasi sekolah, terutama pada tingkat sekolah dasar.

2)      Demografis dan geografis, dilihat dari segi demografis dan geografis bagian terbesar dari jumlah penduduk tinggal di pedesaan, sekitar 70-80% penduduk dunia terutama di Negara-negara miskin dan yang sedang berkembang termasuk Indonesia bermukim di pedesaan. Tenaga pendidik masih sangat kurang karena sebagian penduduk pedesaan berpendidikan rendah.

3)      Aspek sosiologis, jika ditinjau dari segi sosiologis, sebagian besar masyarakat kita beranggapan bahwa harkat dan martabat seseorang akan meningkat apabila memiliki ijazah yang diperoleh melalui jalur pendidikan formal, dengan orientasi ingin menjadi pegawai negeri atau bekerja di perusahaan-perusahaan atau bekerja pada sektor-sektor formal.

4)      Issue gender, jika ditinjau dari isu gender, berbagai pendapat menyatakan keberatan yang dinyatakan dengan terus terang maupun hanya sekedar menggerutu di belakang. Pendapat ini tidak sekedar di kalangan aktivis pembangunan, tetapi juga di kalangan orang-orang yang berkecimpung di bidang pengembangan masyarakat utamanya di bidang pendidikan. Isu yang berkembang tahun-tahun belakangan ini yaitu adanya pola hubungan pembagian peran dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang seimbang, setara dan saling melengkapi.

Pemerintah telah mentargetkan angka buta huruf di Indonesia akan diturunkan hingga 5 persen. Niat pemerintah ini telah memacu pendidik dan tenaga kependidikan luar sekolah untuk mengembangkan misi pendidikan luar sekolah, baik yang berada di daerah perkotaan maupun pedesaan, para pemikir dan pendidik pendidikan luar sekolah berlomba-lomba mengiyakan dan melaksanakan program pemberantasan buta huruf, namun tidak ada gading yang tak retak, semua program pasti mempunyai kendala. Demikian juga dengan program pemberantasan buta aksara ini. Meskipun Indonesia mampu mengurangi angka penyandang buta aksara, namun ternyata dibalik itu semua para subjek pelaksana teknis menghadapi banyak kendala.

1. **Pengertian Masyarakat**

Manusia merupakan bagian dari kehidupan makhluk sosial yang ada di muka bumi. Kumpulan dari manusia inilah yang kemudian dikenal sebagai masyarakat. Kondisi umum yang menyebabkan munculnya masyarakat sendiri salah satu disebabkan adanya naluri alami manusia sebagai makhluk sosial.

Masyarakat sebagai suatu bentuk sistem sosial, dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar akan selalu berusaha mencapai tingkat pemenuhan kebutuhan dasar yang seoptimal mungkin. Sebagai suatu sistemm, masyarakat menunjukkan bahwa semua orang secara bersama-sama bersatu untuk saling melindungi kepentingan-kepentingan mereka dan berfungsi sebagai satu kesatuan yang secara terus menerus berinteraksi dengan system yang lebih besar.

Secara konseptual Koentjaraningrat (2009: 115) mengartikan masyarakat sebagai:

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2) Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.

Mac lver (Soekanto 2006: 22), yang menyatakan bahwa “Warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan”.

Dalam dua pengertian di atas dapat diketahui bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat.

Selanjutnya Emile (Roesmidi, 2005: 11) menjelaskan bahwa:

Masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia dindalamnya ada beberapa unsure yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Konsep masyarakat menurut Marion (Sunarto, 2004:54) mengemukakan empat kriteria yang perlu dipenuhi agar suatu kelompok dapat disebut masyarakat, yaitu:

1. Kemampuan bertahan melebihi hidup seorang individu
2. Rekrutmen seluruh atau sebagian anggota melebihi reproduksi
3. Kesetiaan pada suatu sistem tindakan utama bersama
4. Adanya sistem tindakan utama bersama bersifat swasembada

Dari kedua penjelasan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat ridak dipandang sebagai suatu kumpulan individu-individu semata. Masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup, oleh karena manusia hidup bersama. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan anggota-anggotanya. Dengan kata lain, masyarakat adalah suatu sistem yang terwujud dari kehidupan bersama manusia, yang lazim disebut dengan sistem kemasyarakatan.

Masyarakat adalah tempat bersama dan sebagai kepentingan bersama, yang dimana masalah yang terjadi dalam masyarakat tentunya akan menjadi masalah bersama karena dirasakan bersama-sama. Dalam hal ini terkait masalah buta aksara, yang dimana diketahui bukanlah masalah yang mudah untuk diselesaikan dengan kata lain tidak mudah untuk dihilangkan. Masyarakat yang mengalami masalah tersebut perlu untuk diberdayakan dan dikembangkan skillnya agar bisa mencapai tujuan hidup yang lebih baik.

Pengembangan Masyarakat (community development) merupakan wawasan dasar bersistem tentang asumsi perubahan sosial terancang yang tepat dalam kurun waktu tertentu. Pengembangan dilaksanakan dengan tujuan agar kehidupan manusia baik secara individu maupun kelompok dapat menuju ke arah yang lebih baik.

1. **Pengembangan masyarakat**

Konsep pengembangan masyarakat menyangkut tentang aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, sosiologi, psikologi dan politik. Jumini (2009: 23) menjelaskan bahwa:

Pengembangan masyarakat (community development) sebagai salah satu model pendekatan pembangunan (bottoming up approach) merupakan upaya melibatkan peran aktif masyarakat beserta sumber daya lokal yang ada, dan dalam pengembangan masyarakat hendaknya diperhatikan bahwa masyarakat punya tradisi, dan punya adat-istiadat, yang kemungkinan sebagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai modal sosial.

Selanjutnya Anonim (2009: 18) menjelaskan mengenai pengembangan masyarakat dalam pemberantasan buta aksara bahwa:

Pelaku atau subyek dari pengembangan masyarakat salah satunya adalah pemerintah. Program pengembangan masyarakat dari pemerintah merupakan program yang sudah terencana secara khusus sebagai indikator keberhasilan suatu program pemerintahan. Oleh karena itu, pengembangan masyarakat di sini adalah sesuatu hal yang telah terencana sejak awal. Salah satu program pengembangan masyarakat oleh pemerintah adalah pemberantasan buta aksara atau biasa disebut dengan buta huruf.

Dari kedua penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pengembangan masyarakat secara konseptual adalah suatu model pendekatan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif dan mengarah pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk menopak pertumbuhan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, sosiologi, psikologi dan politik.

Sehubungan dengan hal tersebut Payne (1995: 58) menjelaskan:

Pengembangan masyarakat memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pengembangan masyarakat seringkali diimplementasikan dalam bentuk proyek-proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya dan kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggungjawab.

Selanjutnya Twelvetrees (1991: 132), menjelaskan pengembangan masyarakat sebagai “the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.” Secara khusus pengembangan masyarakat berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, jender, jenis kelamin, usia, dan kecacatan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui secara garis besar bahwa perspektif pengembangan masyarakat dibagi ke dalam dua bingkai, yakni pendekatan profesional dan pendekatan radikal. Pendekatan profesional menunjuk pada upaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian pelayanan dalam kerangka relasi-relasi sosial. Sementara itu pendekatan radikal lebih terfokus pada upaya mengubah ketidakseimbangan relasi-relasi sosial yang ada melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab-sebab kelemahan mereka, serta menganalisis sumber-sumber ketertindasannya.

1. **Pembangunan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat**

Upaya-upaya untuk tercapainya perbaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas, dalam pengertian sehari-hari seringkali disebut sebagai upaya pembangunan. Pendek kata, pembangunan merupakan segala upaya terus menerus ditujukan untuk meperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

Kesejahteraan bukanlah sekedar terpenuhi kebutuhan pokok yang terdiri dari pangan, sandang dan tempat tinggal. Todaro (Mardikanto, 2013: 3) mengemukakan setidaknya terdapat tiga nilai-nilai yang tergantung di dalamnya, yaitu:

1. Tercapainya swasembada, dalam arti kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar yang mencakup: pangan, sandang dan tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dasar, keamanan, rekreasi, dan lain-lain
2. Peningkatan harga diri, dalam arti berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri yang tidak tergantung kepada atau ditentukan oleh pihak lain, terlepas dari penindasan fisik maupun ideology, dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka
3. Diperolehnya suasana kebebasan, dalam arti adanya kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan dan untuk memilih alternative-alternatif yang dapat dan boleh dilakukan untuk mewujudkan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan yang terus menerus bagi setiap individu sebagai warga masyarakat yang sedang membangun itu, tanpa adanya rasa takut dan tekanan dari pihak-pihak lain.

Istilah kesejahteraan bukanlah merupakan suatu hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Suharto (2010: 1) menjelaskan kesejahteraan sosial sebagai ”Kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat”.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kesejahteraan adalah bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

1. **Pemberdayaan masyarakat**

Pemberdayaan dipahami berasal dari kata daya yang mendapat awalan ber-yang menjadi kata berdaya yang artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.

Pengertian pemberdayaan menurut Vidhyandika (1996:135), yaitu:

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah hal kekuasaan. Pemberdayaan secara subtansial merupakan proses memutus atau *breakdown* dari hubungan antara subyek dan obyek. Proses ini mementingkan pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalirnya daya dari subyek ke obyek. Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula obyek menjadi subyek yang baru, sehingga realisasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan realisasi antar subyek dengan subyek yang lain

Pengertian menurut Vidhyandika dapat diartikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya.

Suharto (2010:57) kemudian menjelaskan dengan pemahaman yang sama bahwa:

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah dan tidak beruntung
2. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melelui pengubahan struktur sosial

Selanjutnya Mardikanto (2013:101) menjelaskan bahwa:

Pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar semakin memiliki kemampuan untuk berswakarsa, swadaya, swadana dan swakelola bagi terselenggaranya kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan, dan keinginan-keinginan masyarakat sasarannya.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat dipahami dan diperoleh kesimpulan bahwa pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Pemberdayaan bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang tercermin dalam perbaikan sosial, ekonomi, budaya, sosiologi, psikologi dan politik.

Pengembangan, pembangunan dan pemberdayaan tentunya akan dilakukan dalam menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi masyarakat dalam hal ini adalah buta aksara. Melek huruf merupakan dasar pengetahuan bagi manusia. Dengan membaca manusia dapat meningkatkan kualitas dirinya, yang berujung pada tingginya intelektualitas seseorang. Terlebih saat ini manusia telah memasuki era informasi. Di mana fenomena globalisasi yang terjadi saat ini mengalami akselerasi yang begitu cepat, sebagai dampak dari penerapan Hi-tech society (masyarakat berteknologi tinggi), yang menyebabkan manusia tergiring pada pola interaksi yang sangat cepat.

Kondisi yang demikian menuntut terciptanya individu-individu yang tidak hanya mampu beradaptasi, akan tetapi juga dapat berperan penting di dalamnya. Untuk itu, kita harus sadar bahwa pemberantasan buta huruf merupakan tanggung jawab bersama. Dalam hal ini pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, dan masyarakat harus mempunyai kemauan untuk keluar dari lingkaran buta huruf yang menyengsarakan. Pemberantasan buta aksara tidak dapat langsung dilaksanakan, namun memerlukan waktu dan perancangan program yang tepat.

Dalam pengembangan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, program biasanya dikembangkan untuk menyediakan pelayanan sosial yang secara langsung menyentuh klien atau sasaran perubahan.

1. **Kerangka Pikir**

Buta aksara adalah ketidakmampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Di Indonesia mempunyai banyak masyarakat yang masih buta huruf. Angka buta aksara di Indonesia masih tergolong tinggi mengingat banyaknya angka putus sekolah serta masyarakat yang belum mampu untuk membiayai sekolah. Pemerintah sendiri mempunyai berbagai cara untuk mengurangi angka buta aksara di Indonesia. Cara yang ditempuh dapat dilaksanakan melalui program sekolah gratis, bekerjasama dengan dinas pendidikan maupun ormas lain untuk memberikan diklat khusus kepada penyandang buta aksara, mengurangi jumlah anak yang tidak bersekolah, dan lain-lain. Namun banyak sekali kendala yang dihadapi pemerintah untuk memberantas buta aksara mulai dari peserta didik sampai kepada anggaran biaya untuk kegiatan tersebut.

Hal ini disebabkan karena berbagai faktor diantaranya putus sekolah, kemiskinan, jauh dari layanan pendidikan dan orang tua yang menganggap sekolah itu tidak penting. Begitu banyak faktor yang mendukung lainnya antara lain adanya buta huruf baru, putus sekolah formal yang buta huruf kembali dan hasil garapan pemberantasan buta huruf yang tidak tuntas dan hanya menyebut secara kualitas saja. Seharusnya pemerintah harus lebih tegas dalam merancang sebuah program agar pada akhirnya suatu program dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, pemerintah harus bekerjasama dengan pihak lain agar angka buta aksara di Indonesia dapat berkurang. Harus ditambahnya tenaga pengajar dan diberikan pelatihan-pelatihan lagi. Semua pihak harus ikut berpartisipasi. Apalagi pihak akademisi harus berperan aktif untuk mremberantas masalah buta aksara ini, misalnya mahasiswa harus mengajar satu orang yang buta aksara.

Pemberantasan buta aksara bukan saja tugas pemerintah semata tapi itu tugas kita semua selaku generasi penerus bangsa. Jadi semua pihak harus berpartisipasi untuk memberantas buta aksara, contohnya ibu-ibu PKK harus ikut serta, organisasimasyarakat (Ormas), mahasiswa yag sedang Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan anggota TNI yang mempunyai program TNI Manunggal Aksara.

Dengan berbagai program yang telah dijalankan pemerintah untuk memberantas buta aksara kenapa di segelintir daerah seperti Desa Kayuloe Barat Kecamatan Turatea Kebupaten Jeneponto angka buta aksara masih saja tinggi, hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar, yang salah dalam hal ini apakah pemerintah setempat dalam menjalankan program pemberantasan buta aksara atau warga masyarakatnya yang tidak mau diperhatikan karena sibuk mencari uang dalam memenuhi kebutuhan hidup? Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan melalui skema seperti berikut:

Buta Aksara

Faktor penyebab buta aksara

1. Orang tua yang menganggap sekolah tidak penting
   * Gambaran tentang faktor yang orang tua tidak menganggap sekolah itu penting

* Kaitan masalah orang tua yang tidak menganggap sekolah itu tidak penting dengan masalah buta aksara

1. Jauh dari layanan pendidikan
   * Gambaran tentang faktor masyarakat jauh dari layanan pendidikan

* Kaitan masalah masyarakat yang jauh dari layanan pendidikan dengan masalah buta aksara

1. Putus Sekolah
   * Gambaran tentang masalah putus sekolah
   * Kaitan masalah putus sekolah dengan masalah buta aksara
   * Upaya pemerintah dalam mengurangi angka putus sekolah
2. Kemiskinan
   * Gambaran tentang masalah kemiskinan
   * Upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan
   * Kaitan masalah kemiskinan dengan masalah buta aksara

Upaya mengurangi buta aksara di

Desa Kayuloe Barat

**Gambar 2.1 Skema Kerangka pikir**